

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Bagian ini akan menjelaskan paparan data penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Paparan hasil penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh mengenai persoalan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Berdirinya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal yaitu Lembaga

Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. *Memorandum of Understanding* tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambil alihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.¹

b. Status Hukum Dan Riwayat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPR Dana Merapi didirikan atas dasar akte notaris Yanita Paerbo, SH No. 64 tanggal 30 juli 1992 dan telah disahkan oleh menteri kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C2-392.HT01.01.TH.1993 tanggal 22 januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor pengadilan negeri sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 februari 1993.

Rencana Akuisisi dari pemerintah kabupaten sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten sumenep tanggal 19 November 2001 dengan

¹Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 februari 2001 dengan surat persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Perkembangan PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia No.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Saat ini perda tersebut telah dirubah menjadi PERDA nomer 20 Tahun 2011 tentang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.²

c. Permodalan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Permodalan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, berdasarkan akta pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Merapi nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dari notaris Yanita Poerbo, S.H., telah diubah dengan akta perubahan yang terakhir nomor 4 tanggal 13 Agustus 1999 oleh notaris Ny. Rilia Devi Indrawati, S.H., modal dasar Bank terdiri dari 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 per lembar saham. Modal tersebut telah disetor penuh

²Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

senilai Rp. 250.000.000,- dengan komposisi kepemilikan saham (sebelum Akuisisi) sebagai berikut :

- 1) Poeji Harixon 450 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 225.000.000,
- 2) Poeji Hartono 50 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,

Disetujuinya akuisisi PT Bank Perkriditan Rakyat Dana Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

- 1)Pemerintah Kabupaten Sumenep 490 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 245.000.000,-
- 2)Drs. H.M. Toha Msi10 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp.5.000.000,-

Penambahan modal disetor dilakukan dari Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- oleh pemilik baru dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan N0.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27-05-2002. Peningkatan modal serta perubahan nilai nominal saham tertuang dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny. Sukarini, S.H, notaris di Sidoarjo dengan perubahan sebagai berikut:

- 1)Modal dasar menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)
- 2)Modal setor menjadi Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Nominal saham berubah menjadi Rp. 5.000.000, per lembar, dan mendapat pengesahan Mentri Kehakiman RI dan HAM RI No. C-01.389 HT.01.04.TH. 2004 tanggal 19-01-2004 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Berdasarkan pernyataan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, S.H., di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, Mengalami perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp.

160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sumenep 19.199 lembar saham = Rp. 95.995.000.000,- (99,99 %)
- 2) Perorangan 1 lembar saham = Rp. 5.000.000,- (0,01 %).³

d. Visi, Misi, Dan Budaya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Visi dan misi BPRS Bahkti Sumekar Sumenep telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi seluruh *stakeholders* untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank BPR syariah terkemuka di Indonesia.

Visi:

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.”

Misi:

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah.
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- 3) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

³Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

A. Budaya Perusahaan:

- 1) Berkembang yaitu dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif yang tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang, mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang melakukan inovasi-inovasi.
- 2) Harmonis yaitu rasa persaudaraan, rasa kebersamaan menjadi pedoman hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra.
- 3) Amanah yaitu konsisten dalam bertindak adil, bersikap tegas dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah.
- 4) Kepuasan yaitu memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.
- 5) Transparan yaitu saling terbuka demi membangun kepercayaan dan keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa.
- 6) Integeritas yaitu bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga nama baik, serta taat pada aturan yang berlaku.

e. Struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Struktur organisasi dapat berpengaruh terhadap kelancaran perusahaan atau bank dan terciptanya koordinasi yang baik antar personil serta dapat memperjelas pembagian tugas dan garis wewenang yang berlaku. Keberhasilan perusahaan atau bank juga ditunjang dari sistem pengorganisasian yang baik dan jelas. Organisasi memberikan arah yang baik kepada setiap unsur dalam aktivitas tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan.

1) Pengurus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dewan Komisaris

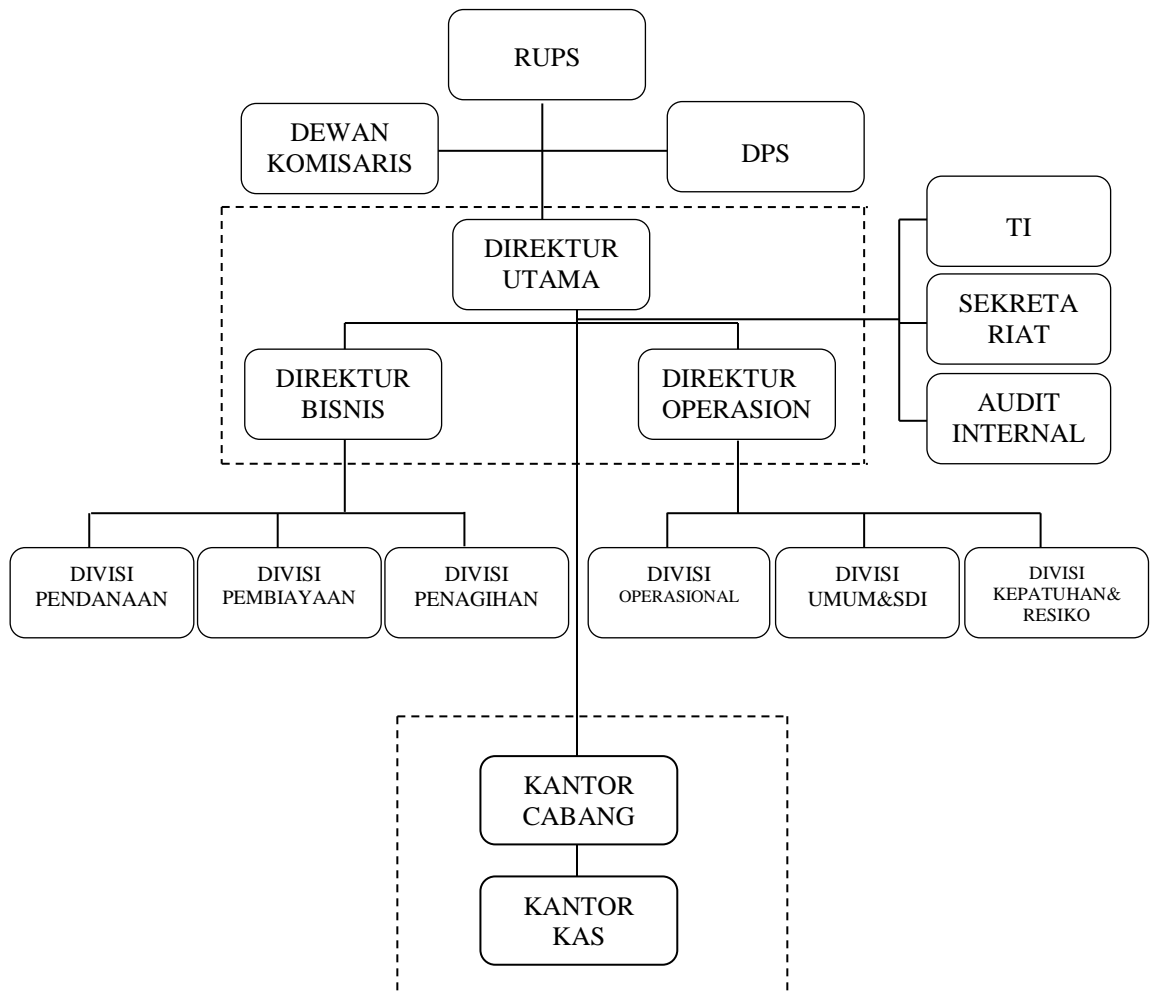
- a) Drs. R. Idris, MM.
- b) KH. M. Taufiq Rachman FM.

Dewan Pengawas Syariah

- a) DR. KH. Achmad Muhammad Tidjani, Lc. MA.
- b) Arina Haqan, SH.I., M.EI.
- c) Drs. KH. Ahmad Washil, M.Pd.I.

Direksi

- a) Novi Sujatmiko
- b) Hairil Fajar
- c) Cahya Wiratama



Gambar 4.1
Stuktur Organisasi

2) *Job description* dalam setiap bagian :

a) RUPS/RAT

RUPS/ RAT merupakan organ organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menetapkan anggaran dasar dan perubahannya, mengangkat dan memberhentikan pengurus bank dan dewan pengawas syariah, dan menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba.

b) Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas mengelola likuiditas bank dan menetapkan semua kebijakan bank yang dipimpinnya. Dan fungsi dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam penjalankan perseroan, mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi, penanggung jawab bank manajemen, penanggung jawab operasional bank secara keseluruhan, dan bersama direksi dalam hubungan *check and balance* bertanggungjawab untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank .

c) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi, mengkaji dan menilai, memberi opini terhadap, kesesuaian pedoman operasional, produk, dan kegiatan operasional terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, mengawasi operasional bank dan produk-produk bank yang sesuai dengan ketentuan syariat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS pada khususnya dan meluas tentang ekonomi islam, dan menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam pada BPRS dan lembaga keuangan lainnya.

d) Direktur

Direktur bertugas mengelola dan mengawasi secara langsung pada seluruh kegiatan operasional bank. Direktur juga berfungsi untuk memimpin usaha bank, merencanakan, menkoordinasikan, melindungi aset, mengendalikan seluruh kegiatan operasional bank, menjalin hubungan silaturahmi, sebagai pimpinan dan pelaksana seluruh kebijakan dari rapat umum pemegang saham, dan bersama dewan komisaris dalam hubungan *check and balance* bertanggungjawab untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank.

e) Internal auditor

Internal auditor bertanggungjawab untuk memeriksa dan melaporkan pengawasan internal atas posisi keuangan bank serta segala hasil aktifitas operasional bank, mengadakan pemeriksaan secara berkala atau mendadak ke setiap bagian, serta memastikan kebenaran data keuangan dan data lainnya yang terkait dengan aktifitas bank, memberikan saran kepada masing-masing bagian untuk menghasilkan suatu sistem pengawasan internal yang kuat, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan bertanggungjawab dan wewenang kepada direksi dan tembusan kepada dewan komisaris

f) Pengawasan dan kepatuhan pembiayaan

Pengawasan dan kepatuhan pembiayaan bertugas untuk mengamati posisi pembiayaan yang mengalami keterlambatan/kemacetan, dan mengusahakan agar pelunasannya dilaksanakan sesuai perjanjian, melakukan upaya penagihan terhadap

pelunasan pembiayaan yang non lancar, menjalankan proses negosiasi upaya penyelesaian pembiayaan macet, dan menjalankan proses eksekusi jaminan nasabah .

g) Kepala Bagian *Marketing*/pemasaran

Kepala bagian pemasaran bertugas mengkoordinasi antar unit kerja di lingkungan perusahaan agar dapat memberi pelayanan jasa perbankan kepada nasabah secara efektif dan efisien, menyusun strategi pemasaran bank dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam pengalokasian kredit / pembiayaan pada masyarakat, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap portofolio kredit / pembiayaan dan menyampaikan saran, opini kepada pihak direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan bidang pemasaran dan perkreditan. Dan juga berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengawasi target funding dan financing serta memastikan strategi yang digunakan tepat sasaran termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebagai anggota komite kredit dalam hal pengembalian keputusan kredit, sebagai aparat manajemen yang membantu pihak direksi dalam menangani tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan perkreditan dan bertanggungjawab kepada direksi.

h) *Account Officer* pendanaan

Account officer pendanaan bertugas untuk mempromosikan produk bank, menghimpun dana pihak ketiga dan dana untuk setoran

modal, menjaga hubungan baik dengan nasabah dan kualitas layanan bank dan *monitoring* rekening aktif dan pasif.

i) *Account Officer* pembiayaan

Account officer pembiayaan bertugas melayani nasabah yang memerlukan pelayanan kredit dan atau jasa perbankan lainnya, bekerjasama dengan bagian lain khususnya hukum / investigasi dalam analisa kredit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat menjaga mutu pelayanan, membuat analisa ekonomi/analisa kredit untuk setiap proses pemberian kredit, mengajukan rekomendasi atas hasil analisa kredit calon nasabah kepada komite kredi, dan memberikan *monitoring* pembinaan dan pengawasan atas setiap kredit yang diberikan. Dan juga berfungsi sebagai staf bank yang menangani pemberian kredit serta melakukan pembinaan dan pengawasan kredit yang telah diberikan berdasarkan kelayakan, kelaziman dan prinsip pemberian yang wajar

j) Remedial (penyelesaian pembiayaan bermasalah)

Remedial bertugas untuk mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan plafond, melakukan komite pembiayaan atas setiap permasalahan yang ditemukan pada nasabah, mengadministrasikan berita acara pembinaan, pernyataan, rescheduling, dan instrument penagihan, melakukan penarikan asset / jaminan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, dan membuat evaluasi remedial dan rencana kerja bulan berikutnya. Dan juga berfungsi

sebagai staf yang melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang remedial dan atau pembiayaan, anggota komite pembiayaan, berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan melaksanakan diskusi di intern perusahaan yang berkaitan dengan bidang kerjanya

k) Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasional bertugas melayani tugas harian dengan aktif pada setiap bagian yang ada di bawah tanggung jawabnya, melaksanakan supervise setiap pelayanan, dan mengamati jasa-jasa perbankan dari setiap bagian. Dan juga berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi serta mengevaluasi seluruh aktifitas operasional (internal – eksternal), sebagai aparat manajemen yang membantu pihak direksi sesuai tugasnya di bidang operasional bank, dan bertanggungjawab kepada direksi .

l) *Customer Service*

Customer Service bertugas melayani jasa perbankan khususnya tabungan dan deposito kepada nasabah, melakukan administrasi pembukuan atas setiap transaksi penarikan uang dan pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya, dan melakukan administrasi pembukuan atas setiap transaksi untuk nasabah maupun untuk bank sendiri.

m) Teller

Teller bertugas untuk melayani nasabah dalam penggunaan slip (penarikan, penyetoran, dan lain-lain), memberikan layanan informasi

kepada nasabah dalam melakukan transaksi tabungan, deposito, cek dan sebagainya, melaksanakan kegiatan administrasi, dan mencatat pembukuan dalam buku besar untuk seluruh transaksi penyetoran maupun pengeluaran setiap harinya. Dan juga berfungsi sebagai staf yang mengurus dan mencatat keluar masuknya uang sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

n) Legal

Legal bertugas mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan, melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah, menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah, melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah, bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah, mengatur dan melaksanakan eksekusi agunan nasabah, dan mengajukan dan menjawab perkara ke pengadilan.

o) Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan bertugas memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen - dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan, dan data lainnya, menyiapkan surat - surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah, mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen

pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah, dan menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.

p) *Accounting*/pembukuan

Accounting bertugas mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil kegiatan operasional, memeriksa kelengkapan bukti – bukti transaksi pembukuan, melakukan proses distribusi pendapatan bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito, dan menyusun laporan keuangan berkala dan laporan keuangan lainnya.

q) Kepala bagian personalia dan umum

Kepala bagian personalia dan umum bertugas merencanakan, mengevaluasi kinerja dan perencanaan karir, merencanakan, mengkoordinasikan bidang umum (internal dan eksternal), dan bertanggungjawab kepada direksi.

r) Logistik dan umum

Logistik dan umum bertugas untuk mengelola dan mencatat pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya umum harian, menyediakan dan mengawasi penggunaan perlengkapan/peralatan kantor, dan mengadministrasikan pelaksanaan penyusutan dan amortisasi sesuai produser akuntansi.

s) Staff Umum

Staff umum bertugas untuk mengadministrasikan seluruh file-file yang berhubungan dengan pajak, ketenagakerjaan, periklanan, kerjasama dengan pihak Dispenda dan lainnya, menata sumber-sumber bacaan (buku-buku, diktat, paper, hasil riset, kliping, majalah, dll) yang ada di perusahaan sehingga untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan tugas, dan mengagendakan seluruh aktifitas surat menyurat baik antar unit maupun dengan pihak luar sehingga dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat. Dan juga berfungsi sebagai staf yang membantu bidang umum dan SDM terutama dalam hal administrasi umum, dan administrasi yang berhubungan dengan intern maupun ekstern bank

t) Personalia dan Pajak

Personalia dan pajak bertugas mengatur dan mengawasi semua aktifitas dan administrasi kepegawaian, melakukan seleksi atas penerimaan pegawai baru sesuai kebutuhan, mengurus perubahan status/jabatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, bertanggungjawab dalam perhitungan gaji beserta hal-hal yang terkait dengan gaji, bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kuliatas SDM, memberikan informasi kepegawaian serta menampung keluhan – keluhan yang diajukan pegawai serta mengajukan solusinya, dan melakukan dan mencatat pembayaran kewajiban pajak kepada instansi pemerintah, serta kewajiban lainnya kepada pihak lain.

u) Satuan Pengamanan/Staff Pembantu

Satuan pengaman bertugas melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah kantor beraktifitas, terutama menyangkut bidang pengamanan secara terpadu dan menyeluruh, memberikan pelayanan keamanan dana penyetoran dan pengambilan nasabah selama jam kerja, menangani dan menciptakan masalah ketertiban lingkungan perusahaan agar merasa nyaman dalam bertransaksi, melaporkan hasil pengawasan perusahaan kepada atasannya satu kali dalam seminggu. Dan berfungsi sebagai staf yang membantu keamanan karyawan dan atau perusahaan, agar dalam menjalankan tugasnya merasa aman, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan kebijakan pihak direksi

v) Kepala kantor cabang

Kepala kantor cabang bertugas memimpin dan mengendalikan kantor cabang, setingkat dengan kepala bagian, dan bertanggungjawab kepada direksi.

f. Produk Dan Layanan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Produk-produk dan layanan yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep sebagai berikut:

- 1) Produk Pendanaan
 - a) Tabungan Barokah
 - b) Tabungan Simpanan Pelajar iB
 - c) Tabungan Qurban
 - d) Tabungan Haji
 - e) Tabungan Umrah

f) Tabungan Hari Raya Deposito Mudharabah

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Serba Guna

b) Pembiayaan Kendaraan

c) Pembiayaan Modal Kerja UMKM

d) Pembiayaan Talangan Umrah

e) Pembiayaan Rahn-Emas

f) Pembiayaan Pensiunan

g) Pembiayaan Al Qordhul Hasan

h) Pembiayaan Elektronik

i) Pembiayaan Kepemilikan Rumah

j) Pembiayaan Pusyar iB

k) Pembiayaan Sadar Bersih

l) Pembiayaan Kepemilikan Emas

m) Pembiayaan Linkage UMKM Primer

n) Pembiayaan Ijarah

3) Produk Layanan

a) Jasa Kiriman Uang

b) Pembiayaan Gaji/Intensif Bagi PNS/Karyawan Swasta/Guru

c) Layanan Multibiller

d) BPRS BS Notifikasi

e) Layanan ATM Tanpa Kartu

2. Data Lapangan

a. Pengendalian Internal Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pengendalian Internal dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas suatu lembaga keuangan syariah, maka penerapannya sangat diperlukan guna mengevaluasi serta mengantisipasi tindakan-tindakan yang sudah atau akan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Pengawasan terhadap keseluruhan sistem yang saling mendukung untuk mewujudkan tujuan suatu instansi seharusnya juga masuk pada sistem Pengendalian Internal, meski pada dasarnya ini penerapan Pengendalian Internal belum merata diterapkan oleh semua Instansi, baik pemerintahan, perusahaan dan lembaga *Profit Orientation* lainnya.

BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal dimana dalam penerapannya dilaksanakan oleh pihak manajemen yang menaungi divisi Auditor Internal yang berperan sebagai divisi yang menganalisis dan memantau juga merencanakan beberapa sistem yang ada dalam BPRS Bhakti Sumekar, hal terpantau langsung oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memang bertugas mengawasi kinerja seluruh Bank Pembiayaan Syariah maupun Konvensional diseluruh Indonesia.

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan pada BPRS Bahkti Sumekar tentang bagaimana cara penerapan pengendalian Internal di lembaga keuangan tersebut, apabila dikaitkan menggunakan Pengendalian Internal

menurut *Frame Work Of Internal Control* (COSO) maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

a) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan Etika merupakan dua hal yang paling diutamakan dalam setiap tindakan BPRS Bahkti Sumekar sebab secara teritorial pusatnya terletak pada sebuah kota yang sangat menjunjung nilai etika yang telah menjadi adat istiadat bagi masyarakat setempat, terlebih lembaga ini merupakan lembaga yang menjadikan Hukum Syariah sebagai salah satu landasannya, sehingga kejujuran, transparansi dan saling mendukung adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, berdasar Motivasi ini BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan Integritas dan Nilai Etika dengan baik.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Penerapan terhadap komitmen kompetensi dalam BPRS Bahkti Sumekar sudah baik karena memperkerjakan setiap karyawan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, walaupun hal tersebut masih belum terpenuhi, BPRS akan mengadakan pelatihan guna menunjang kompetensi tersebut.

c) Dewan Komisaris dan Komite Audit

Pembagian tupoksi kerja antara Dewan Komisaris dan Komite audit sudah cukup baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesadaran masing-masing lini, juga sikap saling menghargai yang dilakukan pada 2 lini tersebut. Dewan komisaris melakukan

pengawasan terhadap kinerja manajemen, Dewan Komisaris pada BPRS Bhakti Sumekar harus terdiri minimal dua orang yang merupakan komisaris Independen yang tidak terikat oleh lembaga. sedangkan komite audit melakukan pengawasan terhadap struktur Pengendalian Internal

d) Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi

Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan seperti adanya analisis resiko dan perencanaan berdasarkan analisis yang kuat, bahkan sebelum rencana tersebut dilaksanakan harus melalui tahapan pengajuan pada OJK.

e) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan cukup baik, hal tersebut terbukti tersusunnya struktural pada pengurus pusat. Namun padabeberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur masih ada yang rangkap jabatan hal itu disebabkan kurangnya sumber SDM didaerah tersebut, disamping itu daerah tertentu terkadang masih memiliki nasabah dalam ruang lingkup yang cukup kecil sehingga tugas dan pekerjaan dalam kantor cabang tersebut tidak terlalu padat.

f) Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya

Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya pada BPRS bhakti sumekar telah diterapkan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap kompetensi yang dibutuhkan bahkan memang sudah kewajiban dari pihak Internal

lembaga dan dari OJK untuk mengembangkan SDM yang dibutuhkan sehingga realokasi dan anggaran dari hasil pendapatan yang diperoleh adalah untuk pengembangan SDM.

2) Penilaian Risiko

a) Tujuan perusahaan secara keseluruhan

Tujuan BPRS bhakti Sumekar adalah memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya, dan hal tersebut terlaksana dengan baik dibuktikan dengan semakin bertambahnya nasabah BPRS setiap tahunnya.

b) Tujuan disetiap tingkat proses

Pada setiap tingkat proses yang terdapat pada BPRS Bhakti Sumekar memiliki target dan target yang harus tercapai, seperti *Costumer service* yang terus melakukan evaluasi setiap minggu guna mencari penerapan layanan terbaik untuk pelayanan nasabah.

c) Identifikasi risiko dan analisisnya

Pengidentifikasian risiko yang diterapkan dalam BPRS Bhakti Sumekar sudah berjalan cukup baik, sebab sudah dipetakan dengan rinci bagian-bagian yang mampu mengidentifikasi hal tersebut salah satunya adalah divisi manajemen risiko.

d) Mengelola perubahan

Kepekaan BPRS Bhakti Sumekar terhadap beberapa perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sudah cukup didasarkan dengan Sistem Pengendalian Internal yang

terus memantau perubahan-perubahan yang terjadi sekaligus cara mengelolanya.

3. Aktivitas Pengendalian Internal

a) Kebijakan dan prosedur

Kebijakan dan Prosedur pada BPRS Bhakti Sumekar sudah baik, sebab setiap aturan dan prosedur baik yang berlaku bagi nasabah maupun karyawan telah de diskripsikan dengan baik, dan sebagian besar sudah masuk dalam sistem yang mampu lebih menyederhanakan sebuah pekerjaan.

b) Keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan

Keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan pada BPRS Bhakti Sumekar dikatakan cukup baik karena memang baru meluncurkan aplikasi untuk nasabah pada 2018 dan hanya sebagian kecil yang mengaplikasikannya. Dan untuk mencegah hal tidak diharapkan sudah ada tim IT yang siap untuk mencegah dan menyelesaikannya.

c) Manajemen perubahan aplikasi

Manajemen perubahan aplikasi pada BPRS bhakti Sumekar masih belum pernah dilakukan sehingga belum bisa ditarik kesimpulan namun jika penginovasian yang dilakukan cukup baik.

d) Keberlangsungan bisnis

Untuk memastikan keberlangsungan dari BPRS Bhakti Sumekar manajemen terus melakukan evaluasi dan inovasi bersama seluruh

pimpinan dan dewan komisaris maupun Dewan pengawas syariah sehingga terciptalah keputusan yang diharapkan oleh nasabah.

4. Informasi dan Komunikasi

a) Kualitas Informasi

Informasi yang dikelola oleh BPRS Bhakti Sumekar sudah baik, salah satunya informasi keuangan yang dilaporkan ke publik disetiap triwulan.

b) Efektivitas Komunikasi

Efektivitas komunikasi BPRS Bhakti Sumekar sudah cukup baik karena komunikasi yang pada setiap divisi dilakukan secara rutin setiap minggunya, yaitu dengan diadakannya rapat mingguan setiap kolektif setiap hari senin.

5. Pemantauan

a) Pengawasan yang terus berlangsung

Pengawasan yang dilakukan dalam BPRS Bhakti Sumekar sudah berjalan dengan baik sebab pemantauan terus dilakukan guna melihat pelaksanaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan.

b) Evaluasi yang terpisah

Setiap divisi yang ada di BPRS Bhakti Sumekar apabila melihat kegagalan dilapangan akan melakukan evaluasi bersama kemudian menyampaikannya pada atasan mereka.

b. Fungsi Manajemen dalam Mengelola Pengendalian Internal di BPRS

Bhakti Sumekar

Manajemen dalam mengelola Pengendalian Internal pada BPRS Bhakti Sumekar dilakukan dengan cukup baik sebab sudah melaksanakan fungsi pokok dari manajemen itu sendiri yang meliputi:

1) Perencanaan Awal

BPRS Bhakti Sumekar merencanakan setiap tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang setahun sebelum pelaksanaannya, sehingga proses perencanaan dilakukan dengan sangat matang yang melibatkan semua pihak baik dari Dewan Komisaris maupun Dewan Syariah dan juga melewati beberapa tahapan seperti pengajuan pada OJK sekaligus mempresentasikannya dikantor OJK Surabaya hal sejalan seperti yang dikatakan kepala Manajemen BPRS Bhakti Sumekar bapak Jamal:

“Kami setiap tahun harus menyampaikan rencana bisnis bank, kami lain dengan pemerintah, kalau pemerintah menganggarkan dulu baru cair, kalau kami engga’, apa yang akan dilakukan pada tahun depan kami sudah rencanakan dan itupun kami mengajukan ke OJK dan mempresentasikannya disana, hal itu dilakukan apakah sesuai dengan kondisinya apa tidak”⁴

Penegasan dari kepala manajemen perihal perencanaan awal yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dapat tergambar dalam paragraf diatas, dijelaskan bahwa setiap pengajuan harus melewati tahap presentasi dari OJK dan dipresentasikan guna melihat kematangan rencana dan tingkat produktifitasnya dan perencanaannya dilakukan setahun sebelum pelaksanaan sehingga bisa dikatakan perencanaan awal pada BPRS Sumekar cukup baik.

⁴Jamal Syahriyanto, Kepala Manajemen BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (17 Februari 2020)

- 2) Pengorganisasian guna meletakkan beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Pengorganisasian yang diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar sudah melalui beberapa tahapan yang cukup ketat sehingga penempatan setiap karyawan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh BPRS Bhakti Sumekar, kejelasan tupoksi setiap divisi juga diperjelas dalam AD/ART BPRS Bhakti Sumekar sehingga setiap karyawan akan melakukan sesuai dengan *Job description* masing-masing.

- 3) Penyusunan Personalia

Penyusunan Personalia pada BPRS Bhakti sumekar dilakukan sejak awal penyusunan oragnisasi sehingga setiap karyawan yang diterima akan diletakkan pada divisi yang sesuai dengan komptensi yang dimiliki sehingga produktifitas akan terus meningkat. Disamping hal tersebut BPRS Bhakti Sumekar juga melakukan pelatihan-pelatihan guna menunjang kompetensi yang dimiliki, hal tersebut diutarakan langsung oleh kepala manajemen.

“Kami diwajibkan untuk melakukan pengembangan SDM, malah dari OJK, jadi sekian persen dari pendapatan yang kami dapatkan harus teralokasi untuk pengembangan SDM, seperti digunakan untuk Diklat, *Training House, In House Training*”⁵

Dari penjelasan diatas BPRS Bhakti Sumekar memang serius dalam mengembangkan SDM sesuai dengan komptensi yang dibutuhkan dimana pemantauan langsung dilakukan oleh OJK, keseriusan BPRS Sumekar dalam pengembangan SDM juga diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti

⁵Jamal Syahriyanto, Kepala Manajemen BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (17 Februari 2020)

Diklat, *Training House, In House Training* dimana dari pelatihan tersebut dapat menunjang kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan.

4) Mengarahkan karyawan untuk melakukan yang telah ditetapkan

Pada awal perencanaan BPRS Bhakti Sumekar sudah menetapkan apa yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan juga selaras dengan apa diinginkan meskipun pada penerapannya Manajemen pada BPRS Bhakti Sumekar juga menemukan beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan semisal dalam pemilihan calon Nasabah Pembiayaan terkadang masih bersifat Subjektif tidak objektif.

5) Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen di BPRS Bhakti Sumekar sudah sesuai dengan standar operasional yang dimiliki, karena disamping mengawasi, manajemen juga diawasi oleh pihak direksi dan pihak direksi juga diawasi oleh dewan komisaris dan dewan syariah sehingga pengawasan yang berlapis-lapis tersebut menyebabkan pengawasan di BPRS Sumekar terbilang cukup baik

“Kami mempunyai dewan komisaris yang terdiri dari komisaris utama dan komisaris anggota yang mengawasi dari berjalannya semua pelaksanaan dan baru-baru dapat himbauan langsung dari OJK bahwa dua anggota komisaris harus terdiri dari pihak independen yang tidak terikat oleh BPRS Bhakti Sumekar. Selain itu kami juga punya dewan pengawas syariah yang mengawasi dari sisi syariahnya dan selain dua dewan tersebut kami juga diawasi oleh OJK”⁶

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa pengawasan di BPRS Bhakti Sumekar sudah cukup baik sehingga pelaksanaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan tujuan yang diinginkan. Meski

⁶Jamal Syahriyanto, Kepala Manajemen BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (17 Februari 2020)

juga ditemukan beberapa standar kerja yang tidak sesuai dengan prosedural pada beberapa kantor cabang, terutama untuk kantor cabang kepulauan yang sulit dalam akses dan minim SDM yang dimiliki oleh daerah tersebut.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang mempunyai fungsi independen pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki bagian/divisi audit internal disini memiliki beberapa bagian. Dalam divisi ini juga terdapat pengawas pembiayaan yang bertugas mengawasi setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Divisi audit internal juga melakukan pemeriksaan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan, atau juga sesuai dengan perencanaan audit yang sudah ditetapkan. Selain memiliki audit internal BPRS juga memiliki auditor eksternal yaitu KAP, Inspektorat, dan juga OJK, untuk auditor eksternal sendiri dilakukan setiap setahun sekali.”⁷

Dapat disimpulkan divisi audit disini memiliki peran dan fungsi dalam langkah pengawasan perihal pemeriksaan dan fungsi dalam langkah pengawasan perihal pemeriksaan dan meyakinkan apakah seluruh kebijaksanaan atau kesatuan dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dan ditaati dengan baik. Bhakti Sumekar Sumenep juga memiliki rekanan audit independen yang melakukan fungsi pengawasan dari luar perusahaan. Bentuk pengawasan ini sangat penting dilakukan selain untuk kemajuan bank sendiri, tapi juga untuk memperoleh kepercayaan oleh masyarakat.

⁷ Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (28 Januari 2020).

c. Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Bentuk Pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga dilakukan dengan pengamanan dengan memberikan nomer urut pada setiap formulir permohonan pembiayaan yang biasa disebut nomer register. Setiap transaksi akan melalui proses registrasi, salah satu tujuannya yaitu memudahkan pengawasan dalam aktivitas kerja yang otomatis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retha selaku bagian admin pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

“Setiap pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah akan diinput dalam sistem, secara otomatis nanti akan mendapatkan nomer register. Nomer register ini akan menjaga keamanan data dan mempermudah dalam proses pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah. Setiap dilakukan transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut akan menggunakan nomer register tersebut.”⁸

Dapat disimpulkan setiap permohonan pembiayaan akan mendapatkan nomer register untuk memudahkan setiap transaksi dan juga untuk menjaga keamanan yaitu memudahkan pengawasan dalam aktivitas kerja yang otomatis di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Setiap pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Bahkti Sumekar Sumenep nasabah akan mengajukan nominal pembiayaan. Pemberian nominal didasarkan pada jaminan yang ada, kemampuan nasabah dalam membayar, dan juga kebutuhan usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retha selaku bagian admin pembiayaan *mudhrabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

⁸Retha, Admin Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (17 Februari 2020).

“Setiap pemberian pembiayaan nasabah bebas mengajukan nominal yang diinginkan. AO yang bertugas untuk menilai dan mensurvei data usaha nasabah akan menentukan keputusan pembiayaan tersebut. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sendiri mempunyai batasan-batasan dalam pemberian pembiayaan. Nominal yang diberikan tergantung keputusan AO dan komite setelah dilakukan survei. Jaminan juga menjadi tolak ukur dalam keputusan pemberian pembiayaan.”⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Batasan pemberian pembiayaan tergantung hasil survei seperti usaha yang diberi biaya, jaminan yang diberikan, dan juga lainnya. AO berperan penting dalam tahap ini, karena AO yang akan datang langsung ke lapangan untuk menilai usaha nasabah tersebut. Selain itu juga ada persetujuan dari beberapa bagian dalam BPRS Bhakti Sumekar tergantung nominal yang diajukan. Batasan pembiayaan penting, agar mencegah terjadinya pembiayaan macet, pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. ”

Dapat disimpulkan, pemberian batasan pembiayaan sangat penting untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar, untuk mencegah adanya pembiayaan macet. Setiap pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, usaha yang dilakukan, jaminan yang diberikan dan juga lainnya.

Jaminan merupakan asset yang dimiliki oleh nasabah yang dijanjikan kepada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Setiap pemberian pembiayaan pasti disertai jaminan untuk mengamankan pembayaran kembali pembiayaan jika nasabah ingkar janji. Jaminan yang diberikan nasabah nanti akan dicek ke legalannya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya ketidak benaran jaminan, bisa bukan milik sendiri, atau jaminan ini sebenarnya tidak ada. Jaminan disini sangat penting

⁹Retha, Admin Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (17 Februari 2020).

adanya, agar dapat dijual ketika nasabah tidak mampu dalam membayar tanggungan kepada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.”¹⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, setiap permohonan pembiayaan harus disertai dengan jaminan. Jaminan ini juga bisa menentukan permohonan pembiayaan yang kita ajukan diterima atau ditolak dan sebagai tolak ukur pemberian nominal pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Pembiayaan dalam suatu bank tidak akan lepas dari pembiayaan macet, sebelum terjadi pembiayaan macet terjadi beberapa tahapan sebelum pembiayaan itu dikatakan pembiayaan macet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Pembiayaan dikatakan pembiayaan macet setelah tidak membayar angsuran sebanyak 9 kali. Tiga kali tidak membayar dianggap kurang lancar, enam kali tidak membayar dianggap meragukan, dan sembilan tidak membayar dianggap pembiayaan macet. Sebelum terjadi pembiayaan macet akan dilakukan peringatan, setelah terjadi peringatan tetap tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan akan ada surat penagihan langsung untuk nasabah. Setelah terjadi pembiayaan macet, jika ada jaminan maka jaminan yang ada pada bank akan dilelang.”¹¹

Pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ada tahapan-tahapan sebelum pembiayaan tersebut dikatakan pembiayaan macet. Pembiayaan kurang lancar apabila nasabah tidak membayar angsuran sebanyak tiga kali, enam kali tidak membayar pembiayaan diragukan, dan sembilan kali tidak membayar dianggap pembiayaan macet. Pembiayaan kurang lancar, pihak bank atau AO yang bertanggung jawab memberi peringatan pada pihak nasabah agar membayar angsuran. Pembiayaan diargukan, pihak bank atau AO akan memberi peringatan

¹⁰Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

¹¹Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (18 Februari 2020).

terhadap nasabah sekaligus memberi surat penagihan. Pembiayaan macet, pihak bank atau AO akan melaporkan terhadap bagian pengawasan beserta dengan surat penagihan terhadap nasabah. Nasabah yang tidak mampu membayar, jaminan yang sudah ada di BPRS Bhakti Sumekar akan dilakukan pelelangan.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Pengendalian Internal pada BPRS Bhakti Sumekar

Komponen-Komponen Pengendalian Internal menurut COSO yang seharusnya diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut yaitu:

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Pengendalian Risiko
- c) Aktivitas pengendalian
- d) Informasi dan Komunikasi
- e) Pemantauan

Untuk menguraikan kesesuaian antara teori pengendalian Internal Menurut COSO penerapannya di BPRS Bhakti Sumekar maka dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan kajian teori tentang komponen dalam sistem pengendalian internal menurut COSO dengan yang ada pada BPRS Bhakti Sumekar

Teori	Temuan Lapangan				Keterangan
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	
<p>Lingkungan Pengendalian: Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. Ia merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, dengan menciptakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian terdiri dari:</p>					
<p>a. Integritas dan nilai etika, berisi: Integritas dan perilaku dengan standar etika yang tinggi, komunikasikan kepada semua karyawan secara lisan dan melalui kebijakan serta aturan-aturan perilaku tertulis, serta mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang bisa membuat orang menjadi tidak jujur, melanggar hukum, dan bertindak tidak etis.</p>	<p>Integritas dan Nilai Etika. Integritas dan Etika merupakan dua hal yang paling diutamakan dalam setiap tindakan BPRS Bhakti Sumekar sebab secara teritorial pusatnya terletak pada sebuah kota yang sangat menjunjung nilai etika yang telah menjadi adat istiadat bagi masyarakat setempat, terlebih lembaga ini merupakan lembaga yang menjadikan Hukum Syariah sebagai salah satu landasannya, sehingga kejujuran, transparansi dan saling mendukung adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, berdasar Motivasi ini BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan Integritas dan Nilai Etika dengan baik.</p>		√		<p>BPRS Sumekar telah melaksanakan sesuai dengan teori yang ada dan berjalan Efektif</p>
Teori	Temuan Lapangan				

	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	Keterangan
b. Komitmen terhadap kompetensi, berisi: Pertimbangan manajemen tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan pengalaman yang diminta untuk pengembangan kompetensi.	Komitmen terhadap kompetensi. Penerapan terhadap komitmen kompetensi dalam BPRS Bahkti Sumekar sudah baik karena memperkerjakan setiap karyawan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, walaupun hal tersebut masih belum terpenuhi, BPRS akan mengadakan pelatihan guna menunjang kompetensi tersebut.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
c. Dewan komisaris dan komite audit, berisi: Independensi mereka dari manajemen yang berkaitan dengan pengalaman, ketepatan tindakan yang diambil, luasnya interaksi dengan auditor intern maupun auditor ekstern, serta pengawasan atas laporan keuangan dan mendorong independensi auditor ekstern.	Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pembagian tupoksi kerja antara Dewan Komisaris dan Komite audit sudah cukup baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesadaran masing-masing lini, juga sikap saling menghargai yang dilakukan pada 2 lini tersebut. Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, Dewan Komisaris pada BPRS Bhakti Sumekar harus terdiri minimal dua orang yang merupakan komisaris Independen yang tidak terikat oleh lembaga. sedangkan komite audit melakukan pengawasan terhadap struktur Pengendalian Internal	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif

Teori	Temuan Lapangan				
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	Keterangan
d. Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi, berisi: Tanggungjawab filosofi pihak manajemen yang beroperasi mereka, yang semakin besar kemungkinan para pegawai akan berperilaku secara bertanggungjawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi.	Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan seperti adanya analisis resiko dan perencanaan berdasarkan analisis yang kuat, bahkan sebelum rencana tersebut dilaksanakan harus melalui tahapan pengajuan pada OJK.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
a. Struktur organisasi, berisi: Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pemantauan aktivitas perusahaan. Struktur organisasi perusahaan biasanya dituangkan dalam bentuk bagan organisasi yang secara tepat menggambarkan hubungan kewenangan dan pelaporan.	Struktur Organisasi. Struktur Organisasi pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan cukup baik, hal tersebut terbukti tersusunnya struktural pada pengurus pusat. Namun pada beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur masih ada yang rangkap jabatan hal itu disebabkan kurangnya sumber SDM di daerah tersebut, disamping itu daerah tertentu terkadang masih memiliki nasabah dalam ruang lingkup yang cukup kecil sehingga tugas dan pekerjaan dalam kantor cabang tersebut tidak terlalu padat.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif

Teori	Temuan Lapangan				
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	Keterangan
f. Kebijakan sumberdaya manusia dan prosedurnya, berisi: Kebijakan pelatihan, tindakan-tindakan pendisiplinan, evaluasi, dan program kompensasi yang memotivasi dan memberi penghargaan atas kinerja yang istimewa.	Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya pada BPRS bhakti sumekar telah diterapkan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap kompetensi yang dibutuhkan bahkan memang sudah kewajiban dari pihak Internal lembaga dan dari OJK untuk mengembangkan SDM yang dibutuhkan sehingga realokasi dan anggaran dari hasil pendapatan yang diperoleh adalah untuk pengembangan SDM.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
Penilaian Risiko: Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. <i>Riskassessment</i> terdiri dari:					
a. Tujuan perusahaan secara keseluruhan, berisi: Identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.	Tujuan perusahaan secara keseluruhan BPRS bhakti Sumekar adalah memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya, dan hal tersebut terlaksana dengan baik dibuktikan dengan semakin bertambahnya nasabah BPRS setiap tahunnya.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif

Teori	Temuan Lapangan				
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	Keterangan
b. a. Tujuan perusahaan secara keseluruhan, berisi: Identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.	Tujuan disetiap tingkat proses. Pada setiap tingkat proses yang terdapat pada BPRS Bhakti Sumekar memiliki target dan target yang harus tercapai, seperti <i>Costumer service</i> yang terus melakukan evaluasi setiap minggu guna mencari penerapan layanan terbaik untuk pelayanan nasabah.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
c. Identifikasi risiko dan analisisnya, berisi:Identifikasi dan analisis terhadap risiko yang terdapat dalam perusahaan.	Identifikasi risiko dan analisisnya. Pengidentifikasian risiko yang diterapkan dalam BPRS Bhakti Sumekar sudah berjalan cukup baik, sebab sudah dipetakan dengan rinci bagian-bagian yang mampu mengidentfkasi hal tersebut salah satunya adalah divisi manajemen risiko.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
d. Mengelola perubahan, berisi: Identifikasi dan penilaian perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.	Mengelola perubahan. Kepekaan BPRS Bhakti Sumekar terhadap beberapa perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sudah cukup didasarkan dengan Sistem Pengendalian Internal yang terus memantau perubahan-perubahan yang terjadi sekaligus cara mengelolanya.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
Aktivitas Pengendalian: Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian terdiri dari:					

Teori	Temuan Lapangan				Keterangan
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	
a. Kebijakan dan prosedur, berisi: Aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.	Kebijakan dan prosedur pada BPRS Bhakti Sumekar sudah baik, sebab setiap aturan dan prosedur baik yang berlaku bagi nasabah maupun karyawan telah de diskripsikan dengan baik, dan sebagian besar sudah masuk dalam sistem yang mampu lebih menyederhanakan sebuah pekerjaan.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
b. Keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan, berisi: pengembangan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.	Keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan pada BPRS Bhakti Sumekar dikatakan cukup baik karena memang baru meluncurkan aplikasi untuk nasabah pada 2018 dan hanya sebagian kecil yang mengaplikasikannya. Dan untuk mencegah hal tidak diharapkan sudah ada tim IT yang siap untuk mencegah dan menyelesaikannya.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada.
c. Manajemen perubahan aplikasi, berisi: pengelolaan seluruh perubahan atas sistem informasi dan memastikan bahwa sistem dibuat dengan mudah dan efisien serta mencegah kesalahan penipuan.	Manajemen perubahan aplikasi pada BPRS bhakti Sumekar masih belum pernah dilakukan sehingga belum bisa ditarik kesimpulan namun jika penginovasian yang dilakukan cukup baik.		√		BPRS Bhakti Sumekar belum melaksanakan teori yang ada.

Teori	Temuan Lapangan				Keterangan
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	
d. Kelangsungan bisnis, berisi:Sebuah proses yang membantu organisasi dalam merencanakan hal-hal yang tidak diharapkan,lebih baik dalam mengatur risiko dan melindungi asset. Artinyabahwawalaupunterjadiinsiden yang bisa menyebabkan kerugian sangat besar di TI dan sumber daya manusia akibat adanya iklim ekstrim, mereka memiliki rencana cadangan yang kuat yang bisa mengembalikan bisnis ke posisi semula secepat mungkin.	Keberlangsungan bisnis. Untuk memastikan keberlangsungan dari BPRS Bhakti Sumekar manajemen terus melakukan evaluasi dan inovasi bersama seluruh pimpinan dan dewan komisaris maupun Dewan pengawas syariah sehingga terciptalah keputusan yang diharapkan oleh nasabah	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
e. Memakai tenaga <i>outsourcing</i> , berisi: Tenaga internal audit <i>outsourcing</i> memiliki fasilitas dan lingkungan yang memungkinkan untuk selalu meningkatkan kompetensi, <i>skill</i> , dan profesionalismenya. Selain itu juga, dengan cara <i>outsourcing</i> pelaksanaan internal audit di dalam perusahaan akan lebih efisien dan efektif.	BPRS Bhakti sumekar tidak memakai tenaga <i>outsourcing</i>		√		BPRS Bhakti Sumekar belum melakukan teori yang ada
Informasi dan Komunikasi: Tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas.					

Teori	Temuan Lapangan				Keterangan
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	
a. Kualitas informasi, berisi: Penggunaan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.	Kualitas Informasi yang dikelola oleh BPRS Bhakti Sumekar sudah baik, salah satunya informasi keuangan yang dilaporkan ke publik disetiap triwulan	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
b. Efektivitas komunikasi, berisi: Pengkommunikasian informasi, termasuk tujuan dan tanggungjawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.	Efektivitas Komunikasi BPRS Bhakti Sumekar sudah cukup baik karena komunikasi yang pada setiap divisi dilakukan secara rutin setiap minggunya, yaitu dengan diadakannya rapat mingguan setiap kolektif setiap hari senin.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
Pemantauan: Penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada.					

Teori	Temuan Lapangan				Keterangan
	BPRS Bhakti Sumekar	1	2	3	
a. Evaluasi yang terpisah, berisi: Penilaian prosedur yang terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan. Para auditor internal perusahaan dapat memonitor aktivitas entitas terkait dalam berbagai prosedur yang terpisah	Evaluasi yang terpisah. Setiap divisi yang ada di BPRS Bhakti Sumekar apabila melihat kegagalan dilapangan akan melakukan evaluasi bersama kemudian menyampaikannya pada atasan mereka.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif
b. Melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi, berisi: Penilaian atas bagian-bagian tertentu dari SPI pada berbagai akhir interval waktu tertentudan melaporkan kelemahan yang ditemukan kepada manajemen atau komite audit beserta rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.	Pelaporan tentang kekurangan-kekurangan yang terjadi pada BPRS Bhakti Sumekar dilakukan dengan sangat inten, dibuktikan dengan diadakan rapat setiaphari senin guna mengetahui hal-hal yang terjadi.	√			BPRS Bhakti Sumekar telah melakukannya sesuai dengan teori yang ada dan berjalan efektif

Sumber: Data diolah

Sumber format tabel: Format tabel merupakan adopsi dari Skripsi

Keterangan:

1 :Diterapkan

2 : Tidak Diterapkan

3 : Diterapkan Sebagian

Dari hasil tabel perbandingan kajian teori tentang komponen dalam sistem pengendalian internal menurut COSO dengan yang ada pada BPRS Bhakti Sumekar, ditemukan ada satu komponen pengendalian internal yang tidak diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar yaitu pemakaian tenaga *outsourcing*, namun hal tersebut tidak menjadi masalah sebab regulasi yang diterapkan memang dilarang menggunakan tenaga *outsourcing*.

Sedangkan untuk komponen pengendalian internal yang lainnya yaitu pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian yang meliputi kebijakandan prosedur, manajemen perubahan aplikasi, dan kelangsungan bisnis, informasi dan komunikasi, serta efektivitas komunikasi telah diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ada pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan sesuai teori karena telah memenuhi unsur-unsur dalam lima komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan efektivitas komunikasi, meskipun terdapat satu bagian dari unsur aktivitas pengendalian yaitu pemakaian tenaga *outsourcing* yang belum diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar, tetapi secara keseluruhan telah memenuhi kelima komponen Pengendalian Internal Menurut COSO.

Jika diukur dengan Metode Champion maka angka Efektivitas Pengendalian Internal pada lembaga keuangan syariah BPRS Shakti Sumekar telah mencapai 96% yang berarti efektivitas pengendalian Internal Pada BPRS Bhakti Sumekar masuk dalam kriteria sangat Efektif.

2. Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Pengendalian internal pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan dengan pemisahaan tugas dan fungsi masing-masing bagian, untuk meminimalkan terjadinya kecurangan.
- b. Pengendalian internal dilakukan dengan pemberian nomer register setiap permohonan pembiayaan, untuk memudahkan dan juga mengamankan pembiayaan.
- c. Pengendalian internal dilakukan dengan memberikan batasan terhadap nominal pembiayaan yang diajukan nasabah disesuaikan dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan nasabah. Dan pemberian jaminan nasabah, sebagai tolak ukur pemberian nominal pembiayaan dan juga sebagai legalitas nasabah.
- d. Pengendalian internal juga digambarkan dengan adanya SKAI dan juga rekanan audit internal yang melakukan fungsi pengawasan dari luar BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

C. PEMBAHASAN

Pengendalian internal adalah metode/sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.¹²

¹² Putri, *Kamus...*, hlm. 183.

Pengendalian internal terdiri dari rencana suatu usaha yang diterapkan untuk:

1. Mengamankan *asset* (harta perusahaan).
2. Mengecek keakuratan.
3. Data akuntansi yang dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan operasional secara efisien dan meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan manajerial.¹³

Pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki peran sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan suatu usaha agar mencapai tujuan. Pengendalian pembiayaan ada untuk meminimalisir adanya pembiayaan macet yang disebabkan adanya kelalaian dari pihak nasabah sendiri atau juga dari pihak internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Berdasarkan Pembahasan yang diteliti yaitu bagaimana Efektifitas Manajemen Pengendalian Internal di BPRS Bhakti Sumekar apakah sudah diterapkan sesuai dengan teori dan sudah berjalan efektif dengan pendekatan prinsip COSO, pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekarapat dilihat pada beberapa uraian berikut:

1. Komponen-komponen Pengendalian Internal menurut COSO dan kesesuaiannya dengan penerapannya di BPRS Bhakti Sumekar
 - a. Lingkungan pengendalian yang meliputi sikap antara sikap yang dikeluarkan oleh manajemen beserta karyawan terhadap pengendalian internal dalam organisasi atau lembaga keuangan.

¹³Andayani, Wuryan. *Audit Internal*.(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008) hlm. 46.

1) Integritas dan Nilai Etika. Integritas dan Etika merupakan dua hal yang paling diutamakan dalam setiap tindakan BPRS Bahkti Sumekar sebab secara teritorial pusatnya terletak pada sebuah kota yang sangat menjunjung nilai etika yang telah menjadi adat istiadat bagi masyarakat setempat, terlebih lembaga ini merupakan lembaga yang menjadikan Hukum Syariah sebagai salah satu landasannya, sehingga kejujuran, tranparansi dan saling mendukung adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, berdasar Motivasi ini BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan Integritas dan Nilai Etika dengan baik.

- a) Komitmen terhadap kompetensi. Penerapan terhadap komitmen kompetensi dalam BPRS Bahkti Sumekar sudah baik karena memperkerjakan setiap karyawan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, walaupun hal tersebut masih belum terpenuhi, BPRS akan mengadakan pelatihan guna menunjang kompetensi tersebut.
- b) Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pembagian tupoksi kerja antara Dewan Komisaris dan Komite audit sudah cukup baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesadaran masing-masing lini, juga sikap saling menghargai yang dilakukan pada 2 lini tersebut. Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap terhadap kinerja manajemen, Dewan Komisaris pada BPRS Bhakti Sumekar harus terdiri minimal dua orang yang merupakan komisaris Independen yang tidak terikat oleh lembaga. sedangkan komite audit melakukan pengawasan terhadap struktur Pengendalian Internal

- c) Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan seperti adanya analisis resiko dan perencanaan berdasarkan analisis yang kuat, bahkan sebelum rencana tersebut dilaksanakan harus melalui tahapan pengajuan pada OJK.
- d) Struktur Organisasi. Struktur Organisasi pada BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan cukup baik, hal tersebut terbukti tersusunnya struktural pada pengurus pusat. Namun pada beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur masih ada yang rangkap jabatan hal itu disebabkan kurangnya sumber SDM di daerah tersebut, disamping itu daerah tertentu terkadang masih memiliki nasabah dalam ruang lingkup yang cukup kecil sehingga tugas dan pekerjaan dalam kantor cabang tersebut tidak terlalu padat.
- e) Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya pada BPRS bhakti sumekar telah diterapkan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap kompetensi yang dibutuhkan bahkan memang sudah kewajiban dari pihak Internal lembaga dan dari OJK untuk mengembangkan SDM yang dibutuhkan sehingga realokasi dan anggaran dari hasil pendapatan yang diperoleh adalah untuk pengembangan SDM.

2) Penilaian Resiko

- a) Tujuan perusahaan secara keseluruhan BPRS bhakti Sumekar adalah memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya, dan

hal tersebut terlaksana dengan baik dibuktikan dengan semakin bertambahnya nasabah BPRS setiap tahunnya.

- b) Tujuan disetiap tingkat proses. Pada setiap tingkat proses yang terdapat pada BPRS Bhakti Sumekar memiliki target dan target yang harus tercapai, seperti *Costumer service* yang terus melakukan evaluasi setiap minggu guna mencari penerapan layanan terbaik untuk pelayanan nasabah.
 - c) Identifikasi risiko dan analisisnya. Pengidentifikasian risiko yang diterapkan dalam BPRS Bhakti Sumekar sudah berjalan cukup baik, sebab sudah dipetakan dengan rinci bagian-bagian yang mampu mengidentifikasi hal tersebut salah satunya adalah divisi manajemen risiko.
 - d) Mengelola perubahan. Kepekaan BPRS Bhakti Sumekar terhadap beberapa perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sudah cukup didasarkan dengan Sistem Pengendalian Internal yang terus memantau perubahan-perubahan yang terjadi sekaligus cara mengelolanya.
- 3) Aktivitas Pengendalian Internal
- a) Kebijakan dan prosedur pada BPRS Bhakti Sumekar sudah baik, sebab setiap aturan dan prosedur baik yang berlaku bagi nasabah maupun karyawan telah de diskripsikan dengan baik, dan sebagian besar sudah masuk dalam sistem yang mampu lebih menyederhanakan sebuah pekerjaan.

- b) Keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan pada BPRS Bhakti Sumekar dikatakan cukup baik karena memang baru meluncurkan aplikasi untuk nasabah pada 2018 dan hanya sebagian kecil yang mengaplikasikannya. Dan untuk mencegah hal tidak diharapkan sudah ada tim IT yang siap untuk mencegah dan menyelesaikannya.
 - c) Manajemen perubahan aplikasi pada BPRS bhakti Sumekar masih belum pernah dilakukan sehingga belum bisa ditarik kesimpulan namun jika penginovasian yang dilakukan cukup baik.
 - d) Keberlangsungan bisnis. Untuk memastikan keberlangsungan dari BPRS Bhakti Sumekar manajemen terus melakukan evaluasi dan inovasi bersama seluruh pimpinan dan dewan komisaris maupun Dewan pengawas syariah sehingga terciptalah keputusan yang diharapkan oleh nasabah.
- 4) Informasi dan Komunikasi
- a) Kualitas Informasi yang dikelola oleh BPRS Bhakti Sumekar sudah baik, salah satunya informasi keuangan yang dilaporkan ke publik disetiap triwulan.
 - b) Efektivitas Komunikasi BPRS Bhakti Sumekar sudah cukup baik karena komunikasi yang pada setiap divisi dilakukan secara rutin setiap minggunya, yaitu dengan diadakannya rapat mingguan setiap kolektif setiap hari senin.